

FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PROVINSI DI INDONESIA

Oleh:
Hadi Sasana¹⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang

ABSTRACT

Fiscal decentralization and implementation of local autonomy are expected to improve equality of local developments, in accordance with the motivation of local governments to develop their region based on their specific potentiality. However, some researches indicate that although decentralization has been implemented in Indonesia for almost a decade, the regions still strongly depend on the central government financially. This research examine the fly paper effect as one of the indicators of the success of decentralization. By examining all provinces in Indonesia, the research try to find out (1) whether the general allocation fund, revenue-sharing, and regionally original income influence the regions' spending; (2) whether there has been a fly paper effect. The important findings of this research indicate that all provinces although have high regionally original income, experienced the flypaper effect.

Keywords: DAU, DBH, flypaper effect, PAD

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001, telah memberikan kesempatan kepada setiap daerah di Indonesia untuk mengembangkan sendiri potensi daerah (*endowment factor*) yang dimilikinya. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Menilik pada konteks desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, konsekuensinya adalah adanya alokasi anggaran dan penyediaan barang publik pada pemerintah daerah. Selain itu, juga berpengaruh pada tanggung jawab dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relations*).

Hubungan keuangan antar pemerintah merujuk pada hubungan keuangan antara berbagai tingkatan pemerintah dalam suatu negara dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan negara, dan pola pengeluarannya (Handayani, 2009). Implikasi langsungnya adalah meningkatnya pendanaan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaan desentralisasi, peran transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.

Sejak desentralisasi diimplementasikan, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumber-sumber keuangannya, seperti dapat dilihat dari implementasi Dana Alokasi Umum (DAU), dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, juga pajak dan retribusi daerah yang dapat diatur sendiri. Di luar

transfer dari pemerintah pusat, di daerah terjadi peningkatan kebutuhan keuangan untuk membiayai kebutuhan daerah yang menjadi kewenangannya. Besarnya nilai transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan, seharusnya menjadi insentif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan fungsinya, pendapatan asli daerah (PAD) seharusnya merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi. Kenyataan yang terjadi adalah dana transfer justru dijadikan sebagai sumber penerimaan utama daerah dibandingkan dengan PAD. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah yang tidak sebanding dengan nilai pendapatan asli daerah (PAD) yang mampu dikumpulkan oleh daerah.

Beberapa peneliti menemukan respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak, dan retribusi). Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates (dalam Halim, 2001) menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut *flypaper effect*. Abdul Halim dan Sukriy Abdullah pernah melakukan pengujian adanya *flypaper effect* pada belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa *flypaper effect* terjadi pada DAU terhadap belanja daerah. Namun hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Karena menurut Halim (2002) Pemda kabupaten/ kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan

Pemda kabupaten/ kota di luar Jawa-Bali. Menanggapi hal tersebut, Maimunah melakukan penelitian yang sama pada Pemda kabupaten/kota di pulau Sumatra pada tahun 2003 dan 2004. Hasil yang diperoleh konsisten dengan penelitian Halim dan Abdullah yaitu DAU periode t-1 memiliki pengaruh lebih besar dari pada PAD periode t-1 terhadap belanja daerah periode t.

Melihat beberapa temuan penelitian sebelumnya yang terfokus di daerah kabupaten/kota, peneliti tertarik untuk melengkapi penelitian tersebut dengan melakukan kajian *flypaper effect* untuk keseluruhan provinsi di Indonesia. Secara lebih mendalam akan dilihat pula pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja Daerah di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Apakah DAU, DBH, dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah provinsi di Indonesia?
2. Apakah terjadi *flypaper effect* dalam kurun waktu 2005 – 2008 di daerah Provinsi di Indonesia?

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menganalisis apakah DAU, DBH, dan PAD memiliki pengaruh terhadap belanja daerah provinsi di Indonesia dan mengetahui apakah *flypaper effect* terjadi pada belanja daerah provinsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

1. Data

Populasi penelitian ini adalah daerah provinsi di Indonesia, yaitu sebanyak 33 daerah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari : Belanja Daerah (BD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data tersebut merupakan data runtun waktu (*time series*), selama periode tahun 2005-2008. Data diperoleh dari instansi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan Republik Indonesia di www.djpk.depkeu.go.id.

2. Metode Analisis

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, penelitian ini menggunakan model ekonometrika berdasarkan pada pengembangan teori sebagai berikut:

$$BD = \beta_0 + \beta_1 DAU + \beta_2 DBH + \beta_3 PAD + \mu \dots\dots\dots(1)$$

di mana:

- BD = Belanja Daerah
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DBH = Dana Bagi Hasil
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- μ = *Disturbance Error*

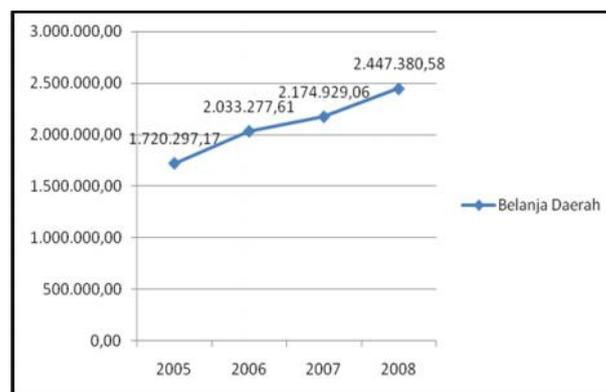
Model penelitian ini memfokuskan pada analisis regresi dengan kombinasi data *time series* dan *cross section*, yang populer disebut dengan *pooled time series*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat pemerintahan kabupaten/kota. Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 33 provinsi, dari jumlah tersebut terdapat 5 provinsi yang memperoleh status khusus, yaitu DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, DI Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat.

1. Perkembangan Belanja Daerah

Belanja daerah mencerminkan aktivitas daerah dalam melaksanakan pembangunan pada tahun anggaran berjalan. Menurut Suparmoko (2000), pengeluaran pemerintah merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa-masa yang akan datang. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Selain itu pengeluaran juga merupakan upaya pemerintah menyediakan barang publik bagi masyarakat dan pihak swasta. Berikut disajikan perkembangan rata-rata total belanja daerah provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2005-2008.



Gambar 1. Rata-Rata Total Belanja Daerah Provinsi di Indonesia, 2005-2008 (dalam Juta Rupiah)

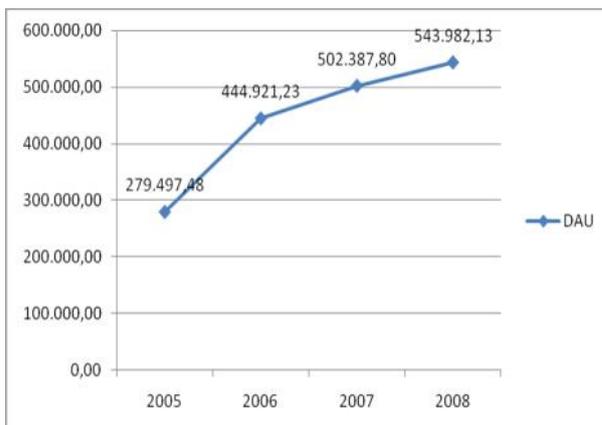
Belanja daerah rata-rata pada tahun 2005 adalah sebesar 1,721 trilyun rupiah, jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2006 menjadi 2,033 trilyun rupiah. Perkembangan belanja daerah terus berlanjut hingga tahun 2007 dan 2008 berturut-turut sebesar 2,174 trilyun rupiah

dan 2,447 trilyun rupiah (Gambar 1). Kondisi yang demikian ini menandakan giatnya pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan belanja daerah.

2. Perkembangan DAU

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Data perkembangan rata-rata total DAU Provinsi di Indonesia sejak tahun 2005 hingga tahun 2008.

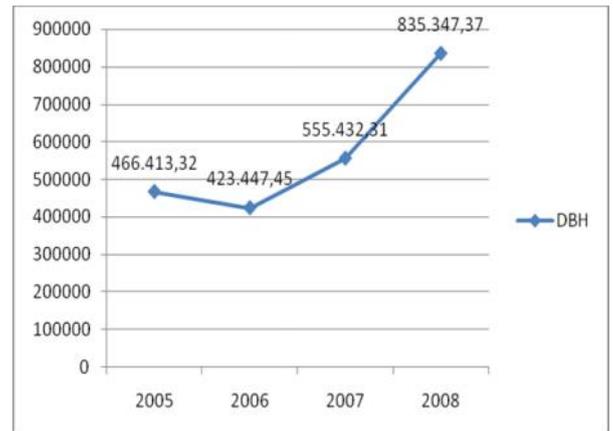
Pada tahun 2005 rata-rata DAU yang diterima oleh provinsi di Indonesia adalah sebesar 279,5 milyar rupiah. Jumlah ini membengkak menjadi 444,9 milyar rupiah pada tahun berikutnya, jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2005. Pada tahun 2007 kembali meningkat menjadi 502,38 milyar rupiah, dan tahun 2008 juga meningkat menjadi 543,9 milyar rupiah.



Gambar 2. Rata-Rata Total DAU Provinsi di Indonesia, 2005-2008 (dalam Juta Rupiah)

3. Perkembangan DBH

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPh perseorangan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya. Berikut ini disajikan perkembangan rata-rata total DBH provinsi di Indonesia, mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.

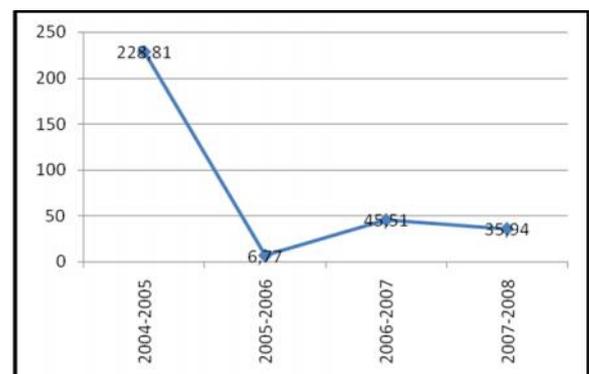


Gambar 3. Rata-Rata Total DBH Provinsi di Indonesia, 2005-2008 (dalam Juta Rupiah)

Pada tahun 2005 tercatat rata-rata total DBH yang diterima pemerintah provinsi adalah sebesar 466,41 milyar rupiah. Tahun 2006, DBH yang terbagi adalah sebanyak 423,4 milyar rupiah. Tahun 2007 rata-rata DBH yang dibagikan kepada 33 provinsi adalah sebesar 555,43 milyar rupiah, kemudian pada tahun 2008 menjadi 835,35 milyar rupiah. Pola pembagian DBH kepada provinsi mengikuti pola pembagian DAU, yaitu pola yang cenderung meningkat.

4. Perkembangan PAD

Tiap daerah diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai wujud asas desentralisasi. Hal ini seperti yang tertuang di penjelasan atas UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut disajikan tren pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) Indonesia dalam kurun waktu 2004-2008.



Gambar 4. Rata-Rata Tren PAD Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2008

Pertumbuhan PAD provinsi dalam 5 tahun periode pengamatan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Periode 2004-2005 terjadi penurunan drastis PAD dari 228,81 persen menjadi 6,77 persen. Periode 2007-2008 laju

pertumbuhan PAD hanya sebesar 35,94 persen, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pertumbuhan PAD oleh sejumlah provinsi, meskipun tidak terlalu tajam.

5. Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh DAU, DBH, dan PAD terhadap Belanja Daerah (BD) provinsi se-Indonesia, digunakan alat analisis regresi berganda dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Karena sifat penaksir OLS yang BLUE (*best linear unbiased estimator*), di mana kelas penaksir tidak bias mempunyai varians yang minimum (Gujarati, 2005). Hasil analisis data dalam penelitian ini berdasarkan penggunaan model di atas dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Estimasi Fenomena *Flypaper Effect*

Indep. Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-28124.66	240440,2	-0,116972	0,9071
DAU	1.512719	0,532464	2,840980	0,0052
DBH	1.187938	0,142484	8,337362	0,0000
PAD	0.748005	0,107135	6,981895	0,0000
R ²	0,867725			
F-Stat	279,8931			
Prob. F	0.000000	Dependen Variable : BD		
Durbin-Watson	1,841945			
N	132			

Signifikansi pada = 5%

a. Uji Asumsi Klasik

Mempertimbangkan bahwa dalam model regresi yang ingin dicapai adalah *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) dan adakalanya sering dijumpai dalam model regresi (terutama regresi linear berganda) berbagai masalah terutama pelanggaran terhadap asumsi klasik, maka dalam penelitian ini dilakukan pengujian asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi, dan hasilnya semua telah memenuhi asumsi klasik.

b. Pengujian Statistik Analisis Regresi

1) Uji Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Uji Statistik F

F-statistik	279,8931
Prob (F-statistik)	0.000000

Berdasarkan uji di atas dapat diketahui bahwa semua variabel independen secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen, karena nilai probabilitas (F-statistik) adalah 0,0000 (<) = 5 % atau 0,05.

2) Uji Koefisien Regresi Secara individual (Uji t)

Pengujian koefisien regresi secara individual (uji t) dilihat dari signifikansi nilai t-hitung. Hasil regresi yang memperlihatkan nilai t-hitung, dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Uji t (Variabel Dependen = BD)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DAU	1,512719	0,532464	2,840980	0,0052
DBH	1,187938	0,142484	8,337362	0,0000
PAD	0,748005	0,107135	6,981895	0,0000
C	-28124,66	240440,2	-0,116972	0,9071

Signifikansi pada = 5%

Berdasarkan pada hasil uji t, maka variabel yang signifikan pada taraf keyakinan 95% (= 5%) adalah DAU, DBH, dan PAD. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yaitu belanja daerah (BD).

3) Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Hasil koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen secara statistik. Berdasarkan hasil regresi utama, diperoleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,8677. Hal ini berarti bahwa perubahan pada variabel-variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 86,77 persen, sedangkan 13,23 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

c. Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi linear berganda di atas, maka dapat dibentuk model persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$BD = -28124,66 + 1,51DAU + 1,19DBH + 0,75PAD + Et$$

.....(2)

Analisis hasil estimasi dari model di atas adalah sebagai berikut:

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD)

Hasil regresi menunjukkan hubungan DAU terhadap belanja daerah adalah positif dan signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa jika DAU meningkat, maka belanja daerah juga meningkat. Apabila DAU mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah, maka nilai belanja daerah akan bertambah sebesar 1,51 juta rupiah.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004), Sukriy dan Halim (2003) yang menemukan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan dana alokasi umum merupakan bentuk transfer dana yang paling penting selain bagi hasil. Selain itu hasil ini juga mendukung temuan Maimunah (2005) yang membuktikan pengaruh DAU terhadap belanja daerah dimana besarnya proporsi DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah (BD)

Hasil regresi menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Peningkatan DBH sebesar 1 juta rupiah akan menambah belanja daerah sebesar 1,19 juta rupiah. Dana bagi hasil dan dana alokasi umum merupakan komponen dana perimbangan dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, nilai *multiplier* DAU lebih besar dampaknya dibandingkan dengan DBH. Hal ini disebabkan karena DAU merupakan dana yang bersifat *grant* dari pemerintah daerah, sedangkan DBH merupakan dana yang diperoleh melalui perhitungan kontribusi daerah terhadap pemerintah pusat baik melalui pajak maupun hasil SDA.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD)

Hasil regresi menunjukkan pengaruh PAD terhadap belanja daerah adalah positif dan signifikan secara statistik. Besarnya hubungan itu adalah sebesar 0,75, artinya adalah jika PAD mengalami kenaikan 1 juta rupiah maka belanja daerah akan meningkat sebesar 0,75 juta rupiah. Hasil ini sesuai dengan temuan yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) yang menyatakan bahwa DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Selain itu hasil ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Bernanda Gatot Tri Bawono (2008) yang menyatakan bahwa PAD dan belanja daerah memiliki hubungan yang positif.

Fenomena *Flypaper Effect*

Hasil regresi bahwa pengaruh DAU lebih besar dibandingkan dengan pengaruh PAD. Hal ini berarti ditemukan *flypaper effect*, artinya kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD, atau respon belanja daerah terhadap penerimaan DAU berbeda dengan penerimaan PAD (Bawono, 2008). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) yang menemukan bahwa dalam model prediksi BD, daya prediksi DAU terhadap BD tetap lebih tinggi dibandingkan dengan daya prediksi PAD, dan hal tersebut telah menunjukkan terjadinya *flypaper effect*.

Flypaper effect dipandang sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai (tambahan) pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga semestinya dihabiskan (dibelanjakan) dengan cara yang sama pula (Hines & Thaler, 1995; dalam Kesit Bambang Prakosa, 2004). Kondisi *flypaper effect* jelas merupakan suatu hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karena kondisi tersebut menunjukkan bahwa daerah masih bergantung terhadap pemerintah pusat. Padahal cita-cita utama otonomi daerah adalah menciptakan kemandirian daerah tanpa bergantung kepada pemerintah pusat. Jika hal ini terus dibiarkan maka otonomi daerah kemungkinan akan mengalami kegagalan (Bawono, 2008).

KESIMPULAN

1. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan koefisien 1,51. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis satu yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU terhadap belanja daerah.
2. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan koefisien 1,19. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis dua yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja daerah.
3. Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan koefisien 0,75. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis tiga yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD terhadap belanja daerah.
4. Terdapat fenomena *flypaper effect* dalam kinerja anggaran pemerintah provinsi, ditunjukkan oleh lebih besarnya pengaruh DAU dibandingkan PAD terhadap belanja daerah.

Beberapa saran dan masukan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Rendahnya kontribusi PAD terhadap belanja daerah disebabkan oleh rendahnya penerimaan daerah dari PAD. Optimalisasi penerimaan PAD

dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak daerah. Mengingat pajak daerah merupakan sumber PAD yang paling besar.

2. Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan disebabkan karena rendahnya PAD. Belanja daerah diharapkan lebih diarahkan pada belanja sektor publik agar penerimaan daerah dari penggunaan sektor publik dapat menambah kas PAD, sehingga ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dapat diminimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. "Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa- Bali)." *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- _____. 2007. "Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi." *The 1st National Accounting Conference*. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- _____. 2009. Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.6, No.1.
- Bawono, Bernando Gatot Tri. 2008. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah." *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar N. 2005. *Basic Econometrics*, New York: McGraw-Hill.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- _____. 2001. Anggaran daerah dan "fiscal stress" (sebuah studi kasus pada Anggaran daerah provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 16 (4): 346-357.
- _____. 2002. Analisis varian pendapatan a11 daerah dalam laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Disertasi diterbitkan.
- Handayani, Atiah. 2009. "Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)." *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.
- Holtz, Eakin, Douglas, Harvey S. Rosen, & Schuyler Tilly. 1994. Intertemporal Analysis of state and local government spending: Theory and test. *Journal Of Urban Economics* 35: 159-174.
- Maimunah, Mutiara. 2006. "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera." *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Oates, Wallace E. 1999. "An Essay on Fiscal Federalism", *Journal of Economic Literature*, XXXVII, Sept, hal. 1120-1149.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY." *JAAI*, Vol 08 No.2.
- Syukriy, Abdullah & Abdul Halim. 2003. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali." *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi VI Yogyakarta*.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*